## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19A Mataram Telp (0370) 632593

website: www.dikbud.ntbprov.go.id e-mail: dikbud@ntbprov.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: (88.4 /959.PK/Dikbud/2023

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA SLB AL-KAUTSAR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Ijin Operasional SLB SLB Al-Kautsar.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

Laporan hasil peninjauan Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB beserta Tim Sarana, Prasarana dan Kelembagaan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Kepada Sekolah Luar Biasa SLB Al-

Kautsar;

KEDUA: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata

timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini

dapat dibatalkan;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan

dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka

keputusan ini batal demi hükum;

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke

pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

udangan yang berlaku;

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam

keputusan ini akan diatur kemudian;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan

diadakan perbaikan.

Ditetapkan : Mataram

Pada Tanggal: 24 Februari 2023 🎢

DMAS PSA DAN KEBA

Dr. H. Aidy Furgan, M.Pd

Pembina Utama Muda NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Jakarta;
- 2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 3. Yth. Kepala KCD Dikbud Lombok Timur;
- 4. Yth. Camat Jerowaru di Jerowaru Lombok Timur;

5. Pertinggal.